



BUPATI HALMAHERA BARAT

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Hamahera Barat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Hasil Workshop Penghitungan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tanggal 21 November 2017 di Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
3. DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
5. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintahan desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Pagu Dana Desa sebesar Rp. 116.643.807.000,- (seratus enam belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan ratus tujuh ribu rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar ;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Formula ;

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ per Desa} = AA \text{ kab} / [(2 \times DST) + (1 \times DT)]$$

Keterangan:

- AA = Alokasi Afiriasi per Desa.
AA Kab = Alokasi Afiriasi Kab. Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018
DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Sangat Tertinggal ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indek kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{ (0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4) \} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan :

- AF = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total Penduduk Desa Kabupaten.
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total Penduduk miskin Desa Kabupaten
Z3 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten
Z4 = Rasio IKG desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

AF kab = Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

BAB II PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDDes;
 - b. Tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian out put Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
 - c. Tahap III berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian out put Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian out put Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian out put Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian out put menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian out put sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian out put dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian out put sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian out put, volume out put, cara pengadaan dan capaian out put.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 10

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

I. Bidang Pembangunan

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan

akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

II. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang meliputi :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
 - c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. Pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. Dukungan
 - f. pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - i. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - l. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB IV PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 14

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati C.q Kepala DPMPD Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I dan Tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kepala desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat.

BAB VI SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
- Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau Pasal 9 ayat (4);
 - Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - d. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - e. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% ; dan
 - f. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desaa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 5 Januari 2018

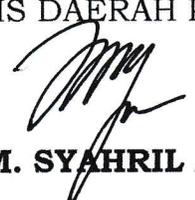
BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT,



DRS. M. SYAHRIL ABD. RADJAK. M.SI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL : 2018
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA
 BAGI SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2018

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Afirmasi | Alokasi Dasar | Alokasi Formula | Pembulatan |
|-----|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | JAILOLO | GUFASA | 0 | 616.345.000 | 26.036.000 | 642.381.000 |
| 2 | | GUAEMAADU | 0 | 616.345.000 | 34.302.000 | 650.647.000 |
| 3 | | JALAN BARU | 0 | 616.345.000 | 292.703.000 | 909.048.000 |
| 4 | | GAM LAMO | 0 | 616.345.000 | 57.277.000 | 673.622.000 |
| 5 | | SOAKONORA | 0 | 616.345.000 | 154.719.000 | 771.064.000 |
| 6 | | GALALA | 0 | 616.345.000 | 67.882.000 | 684.227.000 |
| 7 | | BOBANEHENA | 0 | 616.345.000 | 110.075.000 | 726.420.000 |
| 8 | | PAYO | 0 | 616.345.000 | 67.682.000 | 684.027.000 |
| 9 | | BOBO | 0 | 616.345.000 | 28.546.000 | 644.891.000 |
| 10 | | SARIA | 0 | 616.345.000 | 31.750.000 | 648.095.000 |
| 11 | | IDAM DEHE | 0 | 616.345.000 | 24.921.000 | 641.266.000 |
| 12 | | IDAMDEHE GAMSUNGI | 0 | 616.345.000 | 23.314.000 | 639.659.000 |
| 13 | | MARIMABATI | 0 | 616.345.000 | 39.403.000 | 655.748.000 |
| 14 | | GAMTALA | 0 | 616.345.000 | 35.626.000 | 651.971.000 |
| 15 | | LOLORI | 0 | 616.345.000 | 29.271.000 | 645.616.000 |
| 16 | | TOBOSO | 0 | 616.345.000 | 57.045.000 | 673.390.000 |
| 17 | | HUKU-HUKU KIE | 0 | 616.345.000 | 37.818.000 | 654.163.000 |
| 18 | | ACANGO | 0 | 616.345.000 | 19.921.000 | 636.266.000 |
| 19 | | TEDENG | 0 | 616.345.000 | 47.247.000 | 663.592.000 |
| 20 | | AKEDIRI | 0 | 616.345.000 | 66.345.000 | 682.690.000 |
| 21 | | PORNITI | 0 | 616.345.000 | 55.923.000 | 672.268.000 |
| 22 | | BUKU MATITI | 0 | 616.345.000 | 47.901.000 | 664.246.000 |
| 23 | | TODOWONGI | 0 | 616.345.000 | 69.045.000 | 685.390.000 |
| 24 | | TUADA | 0 | 616.345.000 | 43.629.000 | 659.974.000 |
| 25 | | MATUI | 0 | 616.345.000 | 90.886.000 | 707.231.000 |
| 26 | | BUKU BUALAWA | 0 | 616.345.000 | 37.183.000 | 653.528.000 |
| 27 | | TAURO | 0 | 616.345.000 | 113.927.000 | 730.272.000 |
| 28 | | HATE BICARA | 0 | 616.345.000 | 70.005.000 | 686.350.000 |
| 29 | | GUAERIA | 0 | 616.345.000 | 51.832.000 | 668.177.000 |
| 30 | | PATENG | 0 | 616.345.000 | 85.567.000 | 701.912.000 |
| 31 | | BOBO JIKO | 0 | 616.345.000 | 37.956.000 | 654.301.000 |
| 32 | | ULO | 0 | 616.345.000 | 44.172.000 | 660.517.000 |
| 33 | | KURIPASAI | 0 | 616.345.000 | 31.861.000 | 648.206.000 |
| 34 | | BUKU MAADU | 0 | 616.345.000 | 56.108.000 | 672.453.000 |
| 35 | LOLODA | KEDI | 0 | 616.345.000 | 49.872.000 | 666.217.000 |
| 36 | | SOASIO | 0 | 616.345.000 | 44.210.000 | 660.555.000 |
| 37 | | TOTALA | 0 | 616.345.000 | 71.705.000 | 688.050.000 |
| 38 | | TOLOFUO | 0 | 616.345.000 | 46.122.000 | 662.467.000 |
| 39 | | TUGUIS | 0 | 616.345.000 | 45.885.000 | 662.230.000 |
| 40 | | TASYE | 0 | 616.345.000 | 252.507.000 | 868.852.000 |
| 41 | | LABA BESAR | 0 | 616.345.000 | 73.649.000 | 689.994.000 |
| 42 | | LABA KECIL | 0 | 616.345.000 | 53.447.000 | 669.792.000 |
| 43 | | JANO | 0 | 616.345.000 | 87.359.000 | 703.704.000 |
| 44 | | BAKUN | 0 | 616.345.000 | 73.267.000 | 689.612.000 |
| 45 | | BUO | 0 | 616.345.000 | 73.241.000 | 689.586.000 |
| 46 | | BAKUN PANTAI | 0 | 616.345.000 | 35.448.000 | 651.793.000 |
| 47 | | BARATAKU | 0 | 616.345.000 | 75.675.000 | 692.020.000 |
| 48 | | GAM KAHE | 0 | 616.345.000 | 68.179.000 | 684.524.000 |
| 49 | | PUMA DADA | 0 | 616.345.000 | 88.739.000 | 705.084.000 |
| 50 | | BAJA | 0 | 616.345.000 | 89.305.000 | 705.650.000 |
| 51 | | KAHATOLA | 0 | 616.345.000 | 51.383.000 | 667.728.000 |
| 52 | | BOSALA | 0 | 616.345.000 | 57.974.000 | 674.319.000 |
| 53 | | SALU | 0 | 616.345.000 | 74.509.000 | 690.854.000 |
| 54 | | TOSOMOLO | 0 | 616.345.000 | 105.192.000 | 721.537.000 |
| 55 | | JANGAILULU | 0 | 616.345.000 | 92.637.000 | 708.982.000 |
| 56 | | BANTOLI | 0 | 616.345.000 | 249.951.000 | 866.296.000 |
| 57 | | LINGGUA | 0 | 616.345.000 | 36.396.000 | 652.741.000 |
| 58 | | TOMODO | 0 | 616.345.000 | 49.634.000 | 665.979.000 |
| 59 | | TOTALA JAYA | 0 | 616.345.000 | 61.169.000 | 677.514.000 |
| 60 | | BILOTE | 0 | 616.345.000 | 103.254.000 | 719.599.000 |
| 61 | | ARUKU | 0 | 616.345.000 | 53.363.000 | 669.708.000 |

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Afirmasi | Alokasi Dasar | Alokasi Formula | Pembulatan |
|-----|-----------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 62 | IBU | TOGOLA WAYOLI | 0 | 616.345.000 | 31.797.000 | 648.142.000 |
| 63 | | TOGOLA SANGIR | 0 | 616.345.000 | 49.396.000 | 665.741.000 |
| 64 | | TAHAFO | 0 | 616.345.000 | 40.037.000 | 656.382.000 |
| 65 | | TONGUTE TERNATE | 0 | 616.345.000 | 47.428.000 | 663.773.000 |
| 66 | | AKESIBU | 0 | 616.345.000 | 53.719.000 | 670.064.000 |
| 67 | | MARITANGO | 0 | 616.345.000 | 24.325.000 | 640.670.000 |
| 68 | | KIE ICI | 0 | 616.345.000 | 157.248.000 | 773.593.000 |
| 69 | | TONGUTE GOIN | 0 | 616.345.000 | 33.300.000 | 649.645.000 |
| 70 | | TUNGUTE SUNGI | 0 | 616.345.000 | 28.385.000 | 644.730.000 |
| 71 | | GAM ICI | 0 | 616.345.000 | 50.115.000 | 666.460.000 |
| 72 | | TOBAOL | 0 | 616.345.000 | 69.512.000 | 685.857.000 |
| 73 | | GAMLAMO | 0 | 616.345.000 | 81.367.000 | 697.712.000 |
| 74 | | NAGA | 0 | 616.345.000 | 58.426.000 | 674.771.000 |
| 75 | | SOANA MASUNGI | 0 | 616.345.000 | 102.286.000 | 718.631.000 |
| 76 | | TONGUTE TERNATE ASAL | 0 | 616.345.000 | 20.148.000 | 636.493.000 |
| 77 | | AKE BOSO | 0 | 616.345.000 | 32.287.000 | 648.632.000 |
| 78 | | KAMPUNG BARU | 0 | 616.345.000 | 28.942.000 | 645.287.000 |
| 79 | SAHU | SUSUPU | 0 | 616.345.000 | 86.511.000 | 702.856.000 |
| 80 | | LAKO AKELAMO | 0 | 616.345.000 | 22.347.000 | 638.692.000 |
| 81 | | TARUBA | 0 | 616.345.000 | 35.993.000 | 652.338.000 |
| 82 | | TODAHE | 0 | 616.345.000 | 142.118.000 | 758.463.000 |
| 83 | | PEOT | 0 | 616.345.000 | 92.218.000 | 708.563.000 |
| 84 | | SASUR | 0 | 616.345.000 | 96.524.000 | 712.869.000 |
| 85 | | GORO GORO | 0 | 616.345.000 | 63.518.000 | 679.863.000 |
| 86 | | TACIM | 0 | 616.345.000 | 27.508.000 | 643.853.000 |
| 87 | | BALISOAN | 0 | 616.345.000 | 77.748.000 | 694.093.000 |
| 88 | | WORAT-WORAT | 0 | 616.345.000 | 27.466.000 | 643.811.000 |
| 89 | | TACICI | 0 | 616.345.000 | 41.502.000 | 657.847.000 |
| 90 | | TARAUDU | 0 | 616.345.000 | 59.110.000 | 675.455.000 |
| 91 | | GOLO | 0 | 616.345.000 | 64.339.000 | 680.684.000 |
| 92 | | LAKO AKEDIRI | 0 | 616.345.000 | 69.208.000 | 685.553.000 |
| 93 | | JARA KORE | 0 | 616.345.000 | 42.566.000 | 658.911.000 |
| 94 | | ROPU TENGAH BALU | 0 | 616.345.000 | 30.152.000 | 646.497.000 |
| 95 | | DERE | 0 | 616.345.000 | 37.913.000 | 654.258.000 |
| 96 | | BALISOAN UTARA | 0 | 616.345.000 | 69.549.000 | 685.894.000 |
| 97 | | SASUR PANTAI | 0 | 616.345.000 | 48.351.000 | 664.696.000 |
| 98 | JAILOLO SELATAN | SIDANGOLI GAM | 0 | 616.345.000 | 60.285.000 | 676.630.000 |
| 99 | | SIDONGOLI DEHE | 0 | 616.345.000 | 174.009.000 | 790.354.000 |
| 100 | | DOMATO | 0 | 616.345.000 | 41.430.000 | 657.775.000 |
| 101 | | TATALEKA | 0 | 616.345.000 | 40.389.000 | 656.734.000 |
| 102 | | GAMLENGE | 0 | 616.345.000 | 38.699.000 | 655.044.000 |
| 103 | | AKEJAILOLO | 0 | 616.345.000 | 80.214.000 | 696.559.000 |
| 104 | | BIAMAHI | 0 | 616.345.000 | 38.797.000 | 655.142.000 |
| 105 | | TUGURACI | 0 | 616.345.000 | 74.768.000 | 691.113.000 |
| 106 | | AKEARA | 0 | 616.345.000 | 151.713.000 | 768.058.000 |
| 107 | | AKELAHA | 0 | 616.345.000 | 43.106.000 | 659.451.000 |
| 108 | | DODINGA | 0 | 616.345.000 | 41.627.000 | 657.972.000 |
| 109 | | TEWE | 0 | 616.345.000 | 92.019.000 | 708.364.000 |
| 110 | | TONIKU | 0 | 616.345.000 | 51.131.000 | 667.476.000 |
| 111 | | RIORIBATI | 0 | 616.345.000 | 44.488.000 | 660.833.000 |
| 112 | | TABA DAMAI | 0 | 616.345.000 | 33.965.000 | 650.310.000 |
| 113 | | MOISO | 0 | 616.345.000 | 73.575.000 | 689.920.000 |
| 114 | | BRAHA | 0 | 616.345.000 | 53.958.000 | 670.303.000 |
| 115 | | BANGKIT RAHMAT | 0 | 616.345.000 | 31.422.000 | 647.767.000 |
| 116 | | BOBANE DANO | 0 | 616.345.000 | 38.632.000 | 654.977.000 |
| 117 | | SUKA DAMAI | 0 | 616.345.000 | 62.621.000 | 678.966.000 |
| 118 | | HIJRAH | 0 | 616.345.000 | 64.703.000 | 681.048.000 |
| 119 | | RATEM | 0 | 616.345.000 | 24.194.000 | 640.539.000 |
| 120 | TABARU | PODOL | 0 | 616.345.000 | 145.292.000 | 761.637.000 |
| 121 | | TENGOWANGO | 0 | 616.345.000 | 91.742.000 | 708.087.000 |
| 122 | | TOGOWO | 0 | 616.345.000 | 134.019.000 | 750.364.000 |
| 123 | | DUONO | 147.071.000 | 616.345.000 | 300.051.000 | 1.063.467.000 |
| 124 | | GOIN | 0 | 616.345.000 | 109.451.000 | 725.796.000 |
| 125 | | SANGAJI NYEKU | 0 | 616.345.000 | 112.873.000 | 729.218.000 |
| 126 | | TUGUIS | 0 | 616.345.000 | 239.113.000 | 855.458.000 |
| 127 | | TOGOREBA SUNGI | 0 | 616.345.000 | 22.838.000 | 639.183.000 |
| 128 | | BARONA | 0 | 616.345.000 | 34.422.000 | 650.767.000 |
| 129 | | TODOKE | 0 | 616.345.000 | 94.859.000 | 711.204.000 |
| 130 | | TOLISAOR | 0 | 616.345.000 | 152.834.000 | 769.179.000 |
| 131 | | PASALULU | 0 | 616.345.000 | 214.086.000 | 830.431.000 |
| 132 | | TOGOREBA TUA | 0 | 616.345.000 | 318.926.000 | 935.271.000 |
| 133 | | TUKUOKO | 0 | 616.345.000 | 71.551.000 | 687.896.000 |
| 134 | | SOASANGAJI | 0 | 616.345.000 | 84.916.000 | 701.261.000 |
| 135 | | ARU JAYA | 0 | 616.345.000 | 180.688.000 | 797.033.000 |

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Afirmasi | Alokasi Dasar | Alokasi Formula | Pembulatan |
|--------------|-------------|----------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 136 | IBU SELATAN | TOSOA | 0 | 616.345.000 | 77.609.000 | 693.954.000 |
| 137 | | TOBOBOL | 0 | 616.345.000 | 93.131.000 | 709.476.000 |
| 138 | | BARU | 0 | 616.345.000 | 120.759.000 | 737.104.000 |
| 139 | | NANAS | 0 | 616.345.000 | 88.042.000 | 704.387.000 |
| 140 | | JERE | 0 | 616.345.000 | 94.702.000 | 711.047.000 |
| 141 | | GAMSUNGI | 0 | 616.345.000 | 200.471.000 | 816.816.000 |
| 142 | | BATAKA | 0 | 616.345.000 | 70.332.000 | 686.677.000 |
| 143 | | TALAGA | 0 | 616.345.000 | 217.829.000 | 834.174.000 |
| 144 | | TOBELOS | 0 | 616.345.000 | 53.807.000 | 670.152.000 |
| 145 | | GAMKONORA | 0 | 616.345.000 | 171.246.000 | 787.591.000 |
| 146 | | SARAU | 0 | 616.345.000 | 42.704.000 | 659.049.000 |
| 147 | | NGAWET | 0 | 616.345.000 | 94.324.000 | 710.669.000 |
| 148 | | ADU | 0 | 616.345.000 | 85.673.000 | 702.018.000 |
| 149 | | GAMSIDA | 0 | 616.345.000 | 139.413.000 | 755.758.000 |
| 150 | | NGALO NGALO | 0 | 616.345.000 | 102.152.000 | 718.497.000 |
| 151 | | TUGUAER | 0 | 616.345.000 | 105.616.000 | 721.961.000 |
| 152 | SAHU TIMUR | LOCE | 0 | 616.345.000 | 44.090.000 | 660.435.000 |
| 153 | | IDAM GAMLAMO | 0 | 616.345.000 | 22.070.000 | 638.415.000 |
| 154 | | GAMOMENG | 0 | 616.345.000 | 33.541.000 | 649.886.000 |
| 155 | | AKELAMO | 0 | 616.345.000 | 62.054.000 | 678.399.000 |
| 156 | | TARAUDU KUSU | 0 | 616.345.000 | 46.822.000 | 663.167.000 |
| 157 | | AWER | 0 | 616.345.000 | 30.051.000 | 646.396.000 |
| 158 | | AKETOLA | 0 | 616.345.000 | 31.655.000 | 648.000.000 |
| 159 | | TIBOBO | 0 | 616.345.000 | 28.663.000 | 645.008.000 |
| 160 | | HOKU- HOKU GAM | 0 | 616.345.000 | 25.804.000 | 642.149.000 |
| 161 | | GAMNYIAL | 0 | 616.345.000 | 36.234.000 | 652.579.000 |
| 162 | | GOLAGO KUSUMA | 0 | 616.345.000 | 28.784.000 | 645.129.000 |
| 163 | | NGAON | 0 | 616.345.000 | 35.317.000 | 651.662.000 |
| 164 | | GAMSUGI | 0 | 616.345.000 | 24.320.000 | 640.665.000 |
| 165 | | TABA CAMPAKA | 0 | 616.345.000 | 26.657.000 | 643.002.000 |
| 166 | | CAMPAKA | 0 | 616.345.000 | 31.053.000 | 647.398.000 |
| 167 | | GOAL | 0 | 616.345.000 | 40.446.000 | 656.791.000 |
| 168 | | SIDODADI | 0 | 616.345.000 | 37.877.000 | 654.222.000 |
| 169 | | AIR PANAS | 0 | 616.345.000 | 32.468.000 | 648.813.000 |
| Total | | | 147.071.000 | 104.162.305.000 | 12.334.431.000 | 116.643.807.000 |

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

